

Prodi Administrasi Publik

JURNAL Raga

 JURNAL Raga

 Fisip

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3578420306

Submission Date

May 25, 2026, 5:48 AM UTC

Download Date

May 25, 2026, 5:52 AM UTC

File Name

JURNAL_Raga.pdf

File Size

243.0 KB

10 Pages

3,899 Words

26,370 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 13 words)

Exclusions

- ▶ 17 Excluded Sources

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 14%  Publications
- 23%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 14% Publications
- 23% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	iGroup	2%
2	Internet	
	repository.uinfabengkulu.ac.id	2%
3	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	1%
4	Internet	
	riset.unisma.ac.id	1%
5	Internet	
	repositori.usu.ac.id	1%
6	Internet	
	karya-ilmiah.um.ac.id	1%
7	Student papers	
	Submitted on 1686543524449	1%
8	Internet	
	repository.iainpare.ac.id	<1%
9	Student papers	
	Universitas Jambi	<1%
10	Internet	
	jurnal.uisu.ac.id	<1%
11	Internet	
	jurnal.untirta.ac.id	<1%

12	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%
13	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
14	Student papers	Universitas Jember	<1%
15	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
16	Internet	ojs.unias.ac.id	<1%
17	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
18	Internet	albaayaninstitute.org	<1%
19	Internet	core.ac.uk	<1%
20	Internet	sawoo.ponorogo.go.id	<1%
21	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
22	Student papers	Universitas Sam Ratulangi	<1%
23	Student papers	Universitas Mulawarman	<1%
24	Internet	eprints.amikom.ac.id	<1%
25	Publication	Magdalena Sitompul, Sanasintani Sanasintani, Stynie Nova Tumbol. "IMPLEMENT...	<1%

26	Internet	ejournal.unikarta.ac.id	<1%
27	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
28	Internet	ejournal.uniks.ac.id	<1%
29	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
30	Internet	www.unars.ac.id	<1%
31	Internet	dinsos.sultraprov.go.id	<1%
32	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
33	Internet	jurnalp4i.com	<1%
34	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
35	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
36	Internet	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
37	Internet	journal.unhas.ac.id	<1%
38	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
39	Internet	repositori.uma.ac.id	<1%

40 Internet

text-id.123dok.com <1%

41 Internet

www.jogloabang.com <1%

42 Internet

www.jurnal.uwp.ac.id <1%

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

Raga Kurnia Anjar Trilaksono¹⁾, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Hasan Muchtar Fauzi³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

Email ragakurnia2401@gmail.com

Abstrak

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berbasis non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT mencakup tahapan persiapan, sosialisasi, registrasi, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, pendataan yang tidak akurat, keterbatasan SDM pendamping, ketidaktepatan waktu penyaluran, serta saldo nol pada KPM. Sementara itu, faktor pendukung meliputi partisipasi aktif masyarakat, lokasi e-warung yang strategis, komitmen pemerintah dan TKS, fleksibilitas dalam pemilihan komoditi, serta dukungan dari hasil pertanian lokal. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, pengawasan, dan edukasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT.

Kata kunci: Implementasi, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

Abstract

The Non-Cash Food Assistance Program is a central government initiative to improve the welfare of the poor and food insecure by providing non-cash food assistance. This study aims to analyze the implementation of the BPNT program in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency and identify supporting and inhibiting factors. A qualitative approach was used to collect data through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the BPNT program encompasses the stages of preparation, socialization, registration, distribution, and utilization of assistance. Inhibiting factors include minimal socialization, weak supervision, inaccurate data collection, limited human resources, inaccurate distribution times, and zero balances with beneficiaries (KPM). Supporting factors include active community participation, strategic e-warung locations, government and TKS commitment, flexibility in commodity selection, and support from local agricultural products. These findings emphasize the importance of improved coordination, supervision, and education to optimize the implementation of the BPNT program.

Keywords: Implementation, Program, Non-Cash Food Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat beragam. Berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Banyak faktor yang melatar belakangi kemiskinan mulai dari jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila kurangnya ketersediaan bahan pangan, tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan. Jika diartikan secara luas, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yakni aspek primer dan aspek sekunder. Ditinjau dari aspek primer, kemiskinan mencakup miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial dan politik, serta adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, kurangnya informasi dan rendahnya sumber-sumber keuangan.

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat terutama di bidang perekonomian yang memicu terbentuknya kemiskinan. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2), dimana Pasal 34 ayat (2) tersebut berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Dan Pasal 27 ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Atas dasar tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang didalamnya menjelaskan bahwa kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program merupakan hal paling penting dan harus ada apabila ingin mewujudkan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terstruktur sehingga apa yang dilakukan akan lebih produktif dan efisien. Adapun program yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program tersebut merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) dengan tujuan untuk menekan beberapa kemungkinan adanya penyalahgunaan Bantuan Sosial dari Kemensos agar usaha dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam peraturan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 05 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin pada petunjuk teknis BPNT 2019, program Bantuan Pangan Non Tunai memiliki 4 mekanisme dalam penyalurannya yaitu, proses registrasi dan/ atau pembukaan rekening, pelaksanaan pendistribusian KKS, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran dan barang / jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota terpilih di Indonesia yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Pada tahun 2019 secara bertahap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diperluas ke seluruh kota dan daerah Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, kentang, dan kacang hijau yang tersedia di beberapa lokasi yang ditentukan di agen e-warong dan telah diidentifikasi oleh Bank Penyalur bersama dengan tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah Kabupaten/Kota dan pendamping sosial Bantuan Pangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7), Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah Agen Bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-warong, maka Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Situbondo telah bekerja sama dengan Bank BNI. Persiapan e-warong dilakukan setelah mendapat data jumlah calon KPM di tiap wilayah penyaluran.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bantuan ini kemudian akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang sudah bekerja sama dengan BPNT. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat bantuan sosial sebesar Rp.110.000/KPM, selanjutnya dari tahun 2020 jumlah bantuan tersebut naik sebesar 200.000/KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu elektronik.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sasaran penyaluran BPNT yang diperbolehkan untuk menerima bantuan seperti telah terdaftar di data sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sumbernya berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin (DT-PPFM).

Situbondo merupakan kota dengan 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan, dan 627 Dusun yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu Kecamatan yang ada di Situbondo seperti Kecamatan Panji yang memiliki 11 desa dan 1 kelurahan.

Berdasarkan data masyarakat miskin di Kecamatan Panji sebanyak 7.619 orang. Termasuk salah satu penduduk yang banyak di kelurahan Mimbaan dengan data masyarakat miskin sebanyak 1.149. Kelurahan Mimbaan merupakan desa yang mempunyai 9 dusun diantaranya Dusun Krajan, Mimbaan Utara, Mimbaan Timur, Mimbaan Tengah, Kampung Baru, Karang Anyar, Bujuk Teni, Parebaan, Peng Kepeng yang telah lama melaksanakan program BPNT yakni dari tahun 2019. Kelurahan Mimbaan memiliki jumlah masyarakat sebanyak 29.546 dengan 9.985 kepala keluarga.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka dapat diuraikan bahwa dalam tiga tahun terakhir data kemiskinan yang ada di Kelurahan Mimbaan mengalami pertambahan setiap tahunnya seperti pada tahun 2024 yang merupakan tahun dengan jumlah kemiskinan terbanyak yang apabila diuraikan di Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 149 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 164 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 106 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 151 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 123 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 143 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 93 orang, Dusun Parebaan terdapat 109 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 111 orang dengan total jumlah keseluruhan masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 1.149 orang.

Berdasarkan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah penerima relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yakni pada tahun 2022 terdapat jumlah penerima sebanyak 858 orang, untuk tahun 2023 sebanyak 831 orang dan pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah penerima yaitu pada Dusun Krajan untuk masyarakat miskin terdata ada 85 orang, Dusun Mimbaan Utara terdapat 90 orang, Dusun Mimbaan Timur terdapat 99 orang, Dusun Mimbaan Tengah terdapat 90 orang, Dusun Kampung Baru terdapat 80 orang dan untuk Karang Anyar terdapat 92 orang, Dusun Bujuk Teni terdapat 78 orang, Dusun Parebaan terdapat 83 orang, Dusun Peng kepeng terdapat 90 orang dengan total jumlah keseluruhan masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Mimbaan sebanyak 787 orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan jumlah penerima bantuan BPNT tersebut dikarenakan adanya perubahan data masyarakat seperti meninggal dunia, pindah alamat, dan perekonomian mereka yang sudah mulai stabil sehingga harus dilakukan penggantian data terkini yang akan digantikan dengan masyarakat lain yang lebih berhak dan membutuhkan seperti yang telah tertera dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019.

Program BPNT di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo menurut observasi sebelumnya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program BPNT sudah benar jika dilihat dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang terdapat pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun juga telah merasakan hasil dari adanya program BPNT tersebut. Tetapi terdapat permasalahan umum yang sering dijumpai salah satunya seperti tidak tepatnya penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan yang demikian kerap kali terjadi dikalangan masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai demi mencari keuntungan pribadi dengan menjual kembali bantuan yang didapat seperti beras agar uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang atau bahkan untuk keperluan lain diluar kebutuhan sehari-hari salah satunya seperti melunasi hutang. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan agar angka kemiskinan di Indonesia berkurang, kenyataannya tidak akan ada perubahan bahkan

bisa saja menyebabkan penambahan angka kemiskinan karena bantuan yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur guna mencapai tujuan tertentu dan pelaksanaannya disertai dengan pedoman yang ada. Dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan penelitian sangat penting diperhatikan karena dapat membantu peneliti dalam menentukan rumusan masalah. Oleh karena itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2018:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, (Saryono, 2010:49). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan karena subjek dalam penelitian yaitu tentang analisis program yang akan diuraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian beralamat di Jl. Pasar Panji No.512, Blok A, Mimbaan Timur, Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan yaitu pada tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan, tentunya harus disertai dengan teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh dapat akurat dan terhindar dari kesalahan dalam proses perolehan data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) ada tiga macam wawancara yang dapat dilakukan antara lain wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam karena peneliti belum mengetahui secara pasti terkait informasi yang akan diperoleh sehingga peneliti akan lebih banyak untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh responden saat melakukan wawancara.

Menurut Basrowi (2008:106) metode observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu Observasi partisipasi, Observasi nonpartisipasi. Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi karena peneliti tidak terlibat langsung di kehidupan informan. Observasi dilakukan di Kantor Kelurahan Mimbaan Situbondo dan langsung mendatangi tempat tinggal KPM untuk menambah data yang diperlukan.

Dokumentasi digunakan untuk data-data yang berhubungan dengan hal-hal seperti jurnal, transkrip, buku, dan lain sebagainya. studi dokumentasi yang ada pada penelitian ini langsung didapat dari Kantor Kelurahan Mimbaan dan Masyarakat.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan mekanisme penggunaan akun elektronik melalui kartu yang bekerja sama dengan bank terkait kemudian kartu tersebut akan mendapatkan dana langsung yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan di pedagang ecer yang dalam transaksinya menggunakan elektronik atau biasa disebut dengan e-warong. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan Kartu Keluarga Kombo (KKS). awalnya berupa penyaluran beras yang disingkat dengan RASKIN. Program BPNT merupakan salah satu program bansos regular yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak tahun 2017 dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sistem baru dari penyaluran bantuan pangan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2016:244) Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami., dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif karena apabila jawaban yang didapat belum memuaskan maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan Pengumpulan Data, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tahap persiapan hingga pemanfaatan bantuan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program.

Pada tahap persiapan, pelaksanaan BPNT telah dilakukan melalui koordinasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif program telah direncanakan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, proses penyiapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui aplikasi SIKS-NG juga menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memastikan ketepatan sasaran. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait validitas dan pembaruan data, yang berpotensi menyebabkan ketidakepatan sasaran penerima bantuan.

Selanjutnya, pada tahap sosialisasi dan edukasi, kegiatan ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan program BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami program dengan baik, terutama bagi mereka yang mengikuti sosialisasi. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara merata akibat keterbatasan penyebaran informasi dan tidak terjadwalnya kegiatan sosialisasi. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk dalam menghadapi permasalahan seperti saldo KKS kosong dan prosedur pengaduan.

Pada tahap registrasi dan distribusi KKS, pelaksanaan telah berjalan sesuai prosedur dengan melibatkan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan. Pendampingan oleh tenaga sosial juga membantu masyarakat dalam proses registrasi. Namun, masih terdapat kendala seperti kebingungan masyarakat dalam proses awal registrasi serta perlunya bantuan dari pihak lain, yang menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap program masih perlu ditingkatkan.

Dalam tahap penyaluran dana bantuan, secara umum bantuan telah disalurkan langsung ke rekening KPM tanpa potongan biaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian masyarakat menilai program ini sudah tepat sasaran dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, terdapat pula persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa program belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, serta sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada akurasi data dan proses verifikasi yang belum optimal.

Pada tahap pemanfaatan dana bantuan, program BPNT memberikan fleksibilitas kepada KPM untuk memilih jenis bahan pangan sesuai kebutuhan melalui e-warong. Hal ini menjadi keunggulan program karena mampu meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Meskipun demikian, dari hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan nilai yang seharusnya, serta belum mencukupi kebutuhan dalam jangka panjang. Bantuan yang diterima cenderung hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu 1-2 minggu, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Selain itu, dalam implementasi program BPNT terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait, serta masih adanya ketidaktepatan dalam pendataan penerima manfaat. Faktor lain seperti keterlambatan penyaluran bantuan juga turut mempengaruhi efektivitas program. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung, seperti lokasi e-warong yang strategis dan mudah dijangkau, serta adanya komitmen dari pemerintah dan tenaga pendamping dalam menjalankan program.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program BPNT di Kelurahan Mimbaan telah berjalan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam hal pembaruan data penerima manfaat, peningkatan intensitas sosialisasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di

42 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi dan edukasi, registrasi, penyaluran dana bantuan, serta pemanfaatan dana bantuan. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif, dan penyiapan e-warong. Tahap sosialisasi dan edukasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama pihak perbankan dan pendamping sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme program. Selanjutnya, pada tahap registrasi dilakukan pembukaan rekening kolektif dan distribusi KKS kepada KPM. Pada tahap penyaluran dana bantuan, program ditujukan kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dan belum efektifnya jumlah bantuan yang diterima. Adapun pada tahap pemanfaatan, program BPNT dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan kebebasan dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan.

Selain itu, dalam implementasinya terdapat faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan KPM akibat kurangnya sosialisasi, kurangnya pemantauan dan pengawasan, ketidaktepatan pendataan penerima manfaat, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, keterlambatan penyaluran bantuan, serta adanya permasalahan saldo bantuan yang kosong. Sementara itu, faktor pendukung antara lain tingginya partisipasi masyarakat, lokasi e-warong yang strategis dan mudah dijangkau, komitmen pemerintah dan tenaga kesejahteraan sosial dalam verifikasi data, fleksibilitas KPM dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan, serta ketersediaan komoditas pangan lokal yang mendukung keberlangsungan program. Dengan demikian, meskipun program BPNT telah memberikan manfaat bagi masyarakat, masih diperlukan perbaikan dalam aspek pendataan, pengawasan, dan pelaksanaan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

35
24
7
7
34
Kepada cinta pertama dan panutan Ayahanda dan Ibunda Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus diberikan. Mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Keluargaku yang selalu menjadi inspirasi dan sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S,Sos., M Si, selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pemikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini. Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S,Sos., M Si, Selaku Dosen Pembimbing Utama, telah meluangkan waktu, pemikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membimbing saya selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2018. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Basrowi dan Suwandi, 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

-
- Dunn, William N. 2019. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indradi, S. S. 2018. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Lester, J. P., & Stewart, J. 2017. *Public Policy: An Evoluting Approach*. Wadsworth.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho D, Riant. 2017. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, CV
- Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pangan Dan Bantuan Sosial Tunai
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT)
- Persesjen Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Rohaeni, Heni dan Nisa Marwa. 2018. "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan". *Jurnal Ecodemica*, Vol.2 No.2
- Saryono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suyanto & Sutinah 2018. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Suyanto, Bagong. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tahir, 2020, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Wahab Abdul, Solichin, 2017. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Winarno, Budi. 2019. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zahimu, Hartini. 2018. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017*. Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan. 2(1).

Yarlina Yacoub, 2012. "Pengaruh Tingkat Penagngguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Privinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Eksos*, Vol.8, No 3

Subandi, 2012. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Alfabeta

Arsyad, Lincolin. 2018. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN